



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANALOG SWITCH OFF (ASO) DI INDONESIA

**Ahmad Budiman**

Peneliti Madya

[ahmad.budiman@dpr.go.id](mailto:ahmad.budiman@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pelaksanaan kebijakan *Analog Switch Off* (ASO) di Indonesia akan dilakukan sampai dengan tanggal 2 November 2022. Pada tanggal itu siaran analog yang selama ini dinikmati oleh masyarakat akan beralih ke siaran digital. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menekankan dua tahun sejak diundangkannya ketentuan ini, maka siaran analog harus beralih ke siaran digital. Untuk menjalankan perintah undang-undang, Pemerintah telah menetapkan tiga tahapan ASO meliputi: tahap pertama paling lambat tanggal 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran di 166 kabupaten dan kota, tahap kedua paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran di 110 kabupaten dan kota, dan tahap ketiga paling lambat tanggal 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran di 65 kabupaten dan kota. Total ada 112 wilayah layanan siaran di 341 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah implementasi ASO. Sedangkan daerah yang tidak tercakup layanan ASO terdapat 113 wilayah siaran di 173 kabupaten dan kota. Pemerintah menjelaskan wilayah yang tidak tercakup ASO tersebut akan menjadi sasaran implementasi *Digitalization Broadcasting System* (DBS).

Pemerintah melalui Kementerian Kominfo memberikan keterangan, pelaksanaan ASO secara bertahap merupakan praktik yang lazim dilakukan di berbagai negara. Bahkan, dengan pentahapan ini pemangku kepentingan dapat mempersiapkan siaran digital dengan sebaik-baiknya. Kebijakan pentahapan ini sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan jumlah siaran televisi analog yang juga banyak. Industri televisi dapat mempersiapkan siaran digital dengan sebaik-baiknya, tanpa mengganggu kualitas siaran analog yang saat ini masih dilakukan secara bersamaan (*simulcast*). Persiapan seluruh aspek teknis secara matang menjadi sangat penting untuk dilanjutkan. Penundaan waktu ASO tahap pertama hingga tanggal 30 April 2021 harus dimanfaatkan untuk memastikan siaran televisi digital dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk itu selama proses ASO berlangsung, siaran simulcast tetap dijalankan agar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan siaran digital. Siaran simulcast yang sudah berjalan di hampir seluruh Indonesia tetap dijalankan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyesuaikan dengan siaran televisi digital. Selain itu pemangku kepentingan penyiaran untuk membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar setiap tahapan ASO dapat berlangsung dengan baik, sehingga peralihan oleh masyarakat dari siaran analog ke siaran digital tidak menjadi beban masalah ketika mendekati tanggal pelaksanaan tahapan ASO.

Pemerintah mencatat dari 112 wilayah layanan siaran yang menjadi target ASO di seluruh Indonesia, terdapat 90 wilayah atau sebanyak 80,63% telah memiliki infrastruktur multipleksing dengan jumlah yang memadai untuk implementasi ASO. Sedangkan untuk daerah pada tahap ASO kedua dan ketiga, seluruh pembangunan infrastruktur ditargetkan akan selesai selambat-lambatnya dua bulan menjelang pelaksanaan masing-masing tahapan ASO. Dari sisi konten, tercatat 291 lembaga penyiaran atau 41,75% dari total lembaga

penyiaran yang sudah menyediakan siaran secara digital. Sedangkan untuk 406 lembaga penyiaran lainnya akan menyusul dan harus melakukan peralihan ke siaran digital sebelum setiap tahapan ASO yang telah ditentukan.

Permasalahannya, tidak semua masyarakat di Indonesia telah memiliki televisi digital. Masih sangat banyak masyarakat di Indonesia yang hanya memiliki televisi analog, sehingga tidak akan dapat menerima siaran digital nantinya. Penyediaan *Set Top Box* (STB) menjadi salah satu kunci sukses implementasi digitalisasi penyiaran (ASO) di seluruh wilayah Indonesia. Penyediaan perangkat konversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang ditampilkan di TV Analog itu disesuaikan dengan jumlah penduduk di cakupan wilayah siaran setiap tahapan implementasi ASO.

## Atensi DPR

Panja ASO Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait ASO. Panja ASO Komisi I DPR RI dapat mengevaluasi penyediaan STB tahap pertama di 166 kabupaten dan kota sebanyak 3.203.854 STB. Pengawasan di tahap kedua untuk 96 kabupaten dan kota sebanyak 2.011.941 dari total kebutuhan 2.165.890 STB. Tahap kedua dan ketiga implementasi ASO belum bisa terpenuhi semua. Pada tahap kedua terdapat 14 kabupaten kota dan 153.949 STB, serta tahap ketiga 65 kabupaten kota dengan kebutuhan 1.368.227 STB yang masih harus dicarikan jalan keluarnya. Pemerintah menyiapkan 1 juta STB sesuai dengan keputusan yang ada di dalam APBN Tahun 2022. Selain itu penyediaan dan pendistribusian STB juga dilakukan oleh penyelenggara multipleksing dengan total komitmen saat ini sejumlah 4.177.760 STB. Pengawasan juga dilakukan terhadap implementasi pendaftaran online NIK bagi rumah tangga tergolong miskin dan mempunyai televisi untuk mendapatkan STB gratis dari Pemerintah.

## Sumber

Raker Komisi I, 18 Januari 2022

*Republika*, 15 Februari 2022

Siaran Pers No. 287/HM/KOMINFO/08/2021



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Nidya W. Sayekti  
Venti Eka S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.